
URGENITAS RENCANA TATA RUANG WILAYAH KECAMATAN CILELES SEBAGAI ROADMAP PEMBENTUKAN DAERAH KAWASAN INDUSTRI BARU DI KABUPATEN LEBAK

Jumanah¹, Gian Sumarna², Sukmajaya³, Arif Nugroho⁴, Julizar Idris⁵
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

Abstract

The development of an area will certainly change the order and life of the community around the development location. Land which was originally gardens and rice fields, may turn into factories, office buildings and roads to sustain and support activities in the area, plantation and agricultural land will turn into industrial areas, areas which were originally quiet, cool will turn into noisy, busy, and it might turn hot because the big trees are no longer there. The approach used is a combined approach (Mix Method), namely by carrying out analysis with a qualitative and quantitative approach. Based on the results of the CIPP (Context, Input, Process, Product) analysis, the process of developing a new industrial area in Lebak Regency in 2023 is worthy of being built immediately, considering that everything related to the concept of spatial planning for both the district and province does not violate the rules or concepts. This is in line with the construction of the Serang – Panimbang toll road, which is one of the supporting elements for the existence of the Tanjunglesung SEZ.

Keywords: Urgency, Spatial Planning, Regional Formation, Industrial Area.

Abstrak

Berkembangnya suatu wilayah tentunya akan mengubah tatanan dan kehidupan masyarakat di sekitar lokasi pembangunan. Lahan yang semula berupa kebun dan sawah, dapat berubah menjadi pabrik, gedung perkantoran dan jalan untuk menunjang dan menunjang aktivitas di kawasan tersebut, lahan perkebunan dan pertanian akan berubah menjadi kawasan industri, kawasan yang semula sepi, sejuk akan berubah menjadi bising, sibuk, dan mungkin akan menjadi panas karena pohon-pohon besar sudah tidak ada lagi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan gabungan (Mix Method), yaitu dengan melakukan analisis dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis CIPP (Context, Input, Process, Product), proses pengembangan kawasan industri baru di Kabupaten Lebak pada tahun 2023 layak untuk segera dibangun mengingat segala sesuatu yang berkaitan dengan konsep penataan ruang baik kabupaten dan provinsi tidak melanggar aturan atau konsep. Hal ini sejalan dengan pembangunan Tol Serang – Panimbang yang merupakan salah satu elemen pendukung keberadaan KEK Tanjunglesung.

Kata Kunci : Penataan Ruang, Formasi Wilayah, Kawasan Industri.

Article history:

Submission: April 2024
Revised: May 2024
Accepted: May 2024
Published: Juni 2024

**Corresponding author*

Email: jumanah1011@gmail.com

PENDAHULUAN

Kabupaten Lebak yang posisinya berdampingan secara langsung dengan beberapa wilayah / kabupaten lain (Kusen, Sihabudin, and Cadith 2023), secara geografi sangat diuntungkan mengingat wilayah di Kabupaten Lebak bisa dijadikan sebagai wilayah atau lingkungan bisnis yang kondusif, hal ini disebabkan oleh beberapa alasan berikut: (1) Kabupaten Lebak, memiliki kekayaan sumber daya alam yang beragam dan berlimpah; (2) Lahan untuk industri yang luas dan relatif murah; (3) Tersedianya tenaga kerja produktif, dengan UMR yang masih murah (\pm Rp. 2,7 juta); (4) Telah berdiri pabrik Semen Merah Putih (di kawasan Bayah) dengan kapasitas produksi yang besar (\pm 319 juta M^3); (5) Dengan tersambungnyanya tol Serang Panimbang dengan pintu exit tol di wilayah Cileles, menjadikan wilayah Lebak bisa dikatakan dengan ibukota Jakarta (94, 30 km) dan dekat dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta (85,6 km).

Pengembangan wilayah industri di Kabupaten Lebak sangat memungkinkan terjadi, baik bagi industri baru ataupun perusahaan yang memindahkan tempat produksinya ke wilayah Lebak. Sehingga beberapa tahun ke depan di wilayah Kabupaten Lebak akan tumbuh menjadi wilayah industri yang maju dan berkembang, mengingat semua fasilitas ke arah itu tersedia di Lebak (Pandjaitan 2020). Arah pengembangan tersebut sedikit-demi sedikit terjawab sejak dibagunnya tol Serang – Panimbang yang membentang sejauh 83 Km, pemerintah kabupaten Lebak telah berupaya untuk menjadikan keberadaan TOL tersebut sebagai bagian dari pengembangan wilayah industri. Hal ini sejalan dengan dibukanya pintu keluar (exit tol) di wilayah kecamatan Cileles, membuat wilayah sekitar pintu tol tersebut menjadi daerah baru yang berkembang. Keinginan pemerintah kabupaten Lebak, tentunya didukung pula oleh DPRD Kabupaten Lebak yang telah menyelesaikan proses pengesahan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2014 tentang Rencana Ruang Tata Wilayah (RTRW). Dari informasi yang dihimpun, dalam penetapan revisi Perda RTRW Kabupaten Lebak, terdapat muatan penetapan 8 kecamatan sebagai kawasan industri, yaitu: Kecamatan Banjarsari, Bayah, Cibadak, Cikulur, Cileles, Cimarga, Rangkasbitung, dan Kec. Warunggunung (Sumber : <https://banten.idntimes.com>, diakses pada tanggal 11 Februari 2023, pukul 11.35).

Pemilihan pintu keluar tol (exit tol) di wilayah kecamatan Cileles, merupakan sebuah perjuangan dan lobi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak, demi mewujudkan arah Kebijakan Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Lebak Tahun 2017 – 2036, dimana tahun 2022 – 2026 diharapkan tersedianya infrastruktur kawasan industri dan pemasaran. Sehingga dengan dibukanya pintu keluar di kecamatan Cileles menjadikan rencana tersebut berjalan di trak yang benar.

Gambar 1.1 : Arah Kebijakan Pembangunan Industri Kabupaten Lebak (RPIK)



Sumber : Bappeda Kabupaten Lebak, 2024

Dari informasi yang berkembang di masyarakat sekitar pintu tol di Cileles, telah berkembang pergerakan ekonomi di wilayah tersebut, hal ini dengan banyaknya warga yang membuka warung / toko serta banyak warga luar kabupaten Lebak untuk mencari tanah di sekitar pintu tol tersebut, yang mengakibatkan nilai jual tanah (NJOP) meningkat. Bahkan kenaikan NJOP tanah tersebut sampai berimbas pada wilayah di kecamatan Cikukur. Dengan perkembangan tersebut, tentunya pihak pemerintah Kabupaten Lebak tidak lah berdiam diri, sehingga Pemda Lebak telah mengusulkan dan menetapkan wilayah di Kecamatan Cileles sebanyak 3.190 HA telah ditetapkan sebagai daerah kawasan industri baru (Sumber : Bappeda Kabupaten Lebak, 2022).

Gambar 1.2. Peta Penempatan Wilayah Industri di Kabuapten Lebak



Sumber : Bappeda Kabupaten Lebak, 2023

Berdasarkan gambar di atas, jelas bahwa rencana pemerintah Kabupaten Lebak dalam hal penetapan kawasan industri baru di wilayah Kecamatan Cileles salah satunya adalah tersedianya akses jalan menuju wilayah tersebut serta adanya exit tol di Cileles. Cileles dengan kontur tanah yang sebagian berupa pebukitan yang ditanami oleh tanaman sawit dan karet yang dikelola oleh perusahaan swasta nasional serta kebun dan area pesawahan milik warga setempat. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah baik perkebunan dan pertanian menjadi sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah serta dorongan keinginan terlepas dari wilayah tertinggal, tentunya pihak pemerintah daerah bertekad untuk membuka wilayah industri baru di wilayah Kecamatan Cileles, tentunya perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk masyarakat setempat.

Namun demikian, walaupun dalam konsep yang disajikan wilayah itu dielaborasi dengan konsep kawasan industri hijau yang mengedepankan konsep ramah energi dan pengurangan dampak limbah (Haliah and Nirwana 2019), tentunya masyarakat tidak begitu saja menerima ide dan rencana Bupati Lebak (Pemda Lebak). Sebagian masyarakat menolak wilayahnya dijadikan sebagai kawasan industri baru dan peternakan. Penolakan tersebut, telah disampaikan melalui pihak berwenang serta berbagai aksi lainnya, dan tersebar di beberapa media online seperti berikut:

Gambar 1.3 : Penolakan Aksi Warga Kecamatan Cileles Terhadap rencana pembukaan kawasan industri baru



Sumber : <https://www.facebook.com/Informationofcileles/>
(berita tanggal 25 Mei 2021, diakses 14 Maret 2023)

Berdasarkan gambar dan pemberitaan yang dimuat pada tanggal 25 Mei 2021 tersebut, masyarakat Kecamatan Cileles dan Gunungkencana menolak rencana pembukaan kawasan industri baru di wilayah tersebut. Mereka beranggapan bahwa pembukaan kawasan industri itu hanya akan menguntungkan mereka yang memiliki uang saja. Sementara rakyat kecil tetap menderita. Ungkapan itu berasal dari para nitezen yang berkomentar atas pemberitaan tersebut, seperti terlihat dalam gambar berikut:

Gambar 1.4 : Komentar warga atas rencana pembukaan daerah industri baru di Wilayah Cileles - Lebak



Sumber : Media Online, 2023

Penolakan warga tersebut memang cukup beralasan, mengingat tanah garapan mereka akan hilang bila pembangunan kawasan industri baru tersebut telah berjalan. Sementara berdasarkan pantauan kanal berita lainnya, didapat informasi sebagai berikut:

Gambar 1.5 : Komentar warga atas rencana pembukaan daerah industri baru di Wilayah Cileles - Lebak



Sumber : <https://swara45.com/amda-community>, 2024

Beragam penolakan warga tersebut, menunjukkan rencana pemerintah tidak selamanya mendapat persetujuan dan dukungan masyarakat, dan ini merupakan pekerjaan rumah dari pemerintah. Penolakan dari masyarakat, tidak lah mencerminkan semua warga di wilayah Cileles menolak rencana pemerintah menjadikan wilayah tersebut sebagai kawasan industri baru. Demikian pula masyarakat yang tidak menolak, tidak serta merta mereka mendukung rencana tersebut. Pembangunan sebuah wilayah, sudah barang tentu akan mengubah tatanan dan kehidupan masyarakat di sekitar lokasi pembangunan tersebut (Dharmawan & Sasmita, 2023; Trommel, 2020). Tanah yang awalnya berupa kebun dan sawah, bisa jadi berubah menjadi pabrik, gedung perkantoran dan jalan untuk menopang dan mendukung kegiatan di wilayah tersebut, tanah perkebunan dan pertanian akan berubah menjadi kawasan industri, wilayah yang awalnya sepi, adem akan berubah menjadi bising, ramai, dan mungkin saja berubah menjadi panas karena pepohonan yang besar sudah tidak ada lagi. Perubahan status dan keadaan lingkungan di Cileles, sudah pasti telah dipikirkan matang-matang oleh para pengambil kebijakan di Pemda Lebak.

Payung hukum untuk pembukaan wilayah industri baru dengan konsep yang hijau dan humanis telah dibuka dan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak (Muhlis, Rustiadi, and Munibah 2023), tinggal menunggu datangnya para investor yang akan ikut meramaikan dan menanamkan investasinya di Kabupaten Lebak, dengan rasa aman, dan nyaman. Berdasarkan permasalahan di atas, tentunya perlu dikaji lebih dalam agar rencana pengembangan wilayah industri tersebut berdampak positif bagi warga Kecamatan Cileles khususnya, sehingga kehilangan tanah sawah dan perkebunan dengan dibangunnya exit tol di Cileles dapat tergantikan dengan keberadaan kawasan industri di wilayah tersebut. Serta bisakah pemerintah daerah mengedukasi warga di wilayah Cileles untuk berubah dari yang tadinya masyarakat agraris menjadi masyarakat kapitalis.

METODE

Berdasarkan tujuannya untuk mengetahui Bagaimanakah Analisis Strategi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan Cileles jika ditinjau dari aspek Context, Input, Proses dan Prosedur, serta untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat pencapaian tujuan dari kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan Cileles. Berdasarkan hal tersebut agar hasil penelitian komprehensif kemudian Pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan gabungan (*Mix Methode*), yaitu dengan melakukan analisis dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (Yin, 2003; Creswell, 2014) dengan pengumpulan data primer melalui penyebaran kusioner dan wawancara dengan informan penelitian yakni sebanyak 8 (delapan) orang dari yang dianggap mengetahui permasalahan yang berasal dari BAPPEDA, PUPR, Penanaman Modal dan Perizinan serta, Disperindag, akademisi dan

masyarakat serta data sekunder dengan tahapan analisis data melalui *data collecting*, reduksi data, *display data* dan *conclusion* (Matthew B Miles, Michael Huberman 2014).

HASIL DAN DISKUSI

Dalam melakukan analisis deskriptif peneliti menggunakan pendekatan analisis Urgency, Seriousness, Growth (USG) untuk mengetahui tingkat derajat kepentingan dari sebuah program apabila dijalankan, kesungguhan program, dan pertumbuhan dari program tersebut apabila tidak/dijalankan memiliki dampak seperti apa. Maka dari itu perlulah dilakukan analisis USG untuk menilai dan mendapatkan pendapat masyarakat terkait Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan Cileles sebagai Daerah Kawasan Industri Baru di Kabupaten Lebak Tahun 2023. Analisis USG ini tentunya dilakukan dengan pendekatan sebuah konsep teori 3 (tiga) pilar pembangunan berkelanjutan yaitu pilar lingkungan, pilar ekonomi, dan pilar sosial (Chang, 2015). Hal tersebut mengapa dikaitkan dengan penggunaan pendekatan teori 3 (tiga) pilar pembangunan menurut Chang (2015). Jadi, pada dasarnya konsep pembangunan lingkungan tentunya harus benar-benar memperhatikan aspek keberlanjutan demi menjaga kelestarian ekosistem yang ada.

Pemilihan pintu keluar tol (exit tol) di wilayah kecamatan Cileles, merupakan sebuah perjuangan dan lobi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak, demi mewujudkan arah Kebijakan Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Lebak Tahun 2017 – 2036, dimana tahun 2022 – 2026 diharapkan tersedianya infrastruktur kawasan industri dan pemasaran. Sehingga dengan dibukanya pintu keluar di kecamatan Cileles menjadikan rencana tersebut berjalan di trak yang benar. Permasalahan penolakan sebagian masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Lebak, dan lain-lain merupakan gambaran dari dinamikanya proses pembangunan. Pro dan kontra terhadap sebuah rencana sudah terpikirkan oleh pihak Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat yang telah menyetujui kawasan Kecamatan Cileles tersebut dijadikan sebagai Kawasan Industri baru. Dengan dibukanya dan dibangunnya pintu exit tol di daerah Cileles, menjadikan kawasan itu menjadi strategis ditambah dengan pihak pemerintah kabupaten Lebak telah memberikan peluang untuk para investor, menjadikan sebagian daerah di Kecamatan Cileles menjadi kawasan industri.

Proses pembangunan kawasan industri sudah pasti akan menggeser sebagian wilayah pertanian dan perkebunan rakyat yang sudah ada (Young, Ager, and Thode 2022). Oleh sebab itu perlu langkah-langkah strategis dalam konservasi lahan, khususnya sebagian tetap menjadi area pertanian baik tanaman padi maupun palawija, sehingga proses pembangunan kawasan industri tidak serta merta menghilangkan area pertanian seluruhnya di wilayah tersebut (Keller et al. 2023). Sehingga pembangunan kawasan industri baru tetap dan harus mengedepankan pilar-pilar pembangunan berkelanjutan,

dimana pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan harus dijadikan prinsip dalam pelaksanaan pembangunan tersebut (Haliah & Nirwana, 2019; (Dharmawan and Sasmita 2023).

Peneliti mengelompokkan dalam kajian Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan Cileles sebagai Daerah Kawasan Industri Baru di Kabupaten Lebak Tahun 2023 ini ke dalam 3 (tiga) pilar pembangunan berkelanjutan ke dalam analisis USG, yaitu Berkelanjutan terhadap lingkungan (*Environment Sustainability*), Pertumbuhan Ekonomi (*Ekonomi Growth*) dan Keberlanjutan Sosial (*Social Sustainability*). Sementara untuk untuk melihat dan mengukur bagaimana Proses Pelaksanaan Pembangunan Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan Cileles sebagai Daerah Kawasan Industri Baru di Kabupaten Lebak Tahun 2023, diukur melalui teori yang disampaikan oleh Stufflebeam dkk. (1967) yakni evaluasi kebijakan CIPP (Context, Input, Process, Product) . Adapun hasilnya sebagai berikut :

a. Deskripsi Data

1). Context Evaluation (Evaluasi Terhadap Konteks)

Context Evaluation (Evaluasi Terhadap Konteks), adalah menilai berbagai kebutuhan, masalah-masalah, kesempatan sebagai dasar untuk mendefinisikan tujuan dan prioritas dan menentukan hasil. Dalam membahas Evaluasi Terhadap Konteks. Membahas bagaimana perbaikan kondisi lahan yang awalnya area pertanian dan perkebunan rakyat akan diubah menjadi area kawasan industri.

Gambar 4.2 : Analisis Lokasi terhadap Resiko Bencana



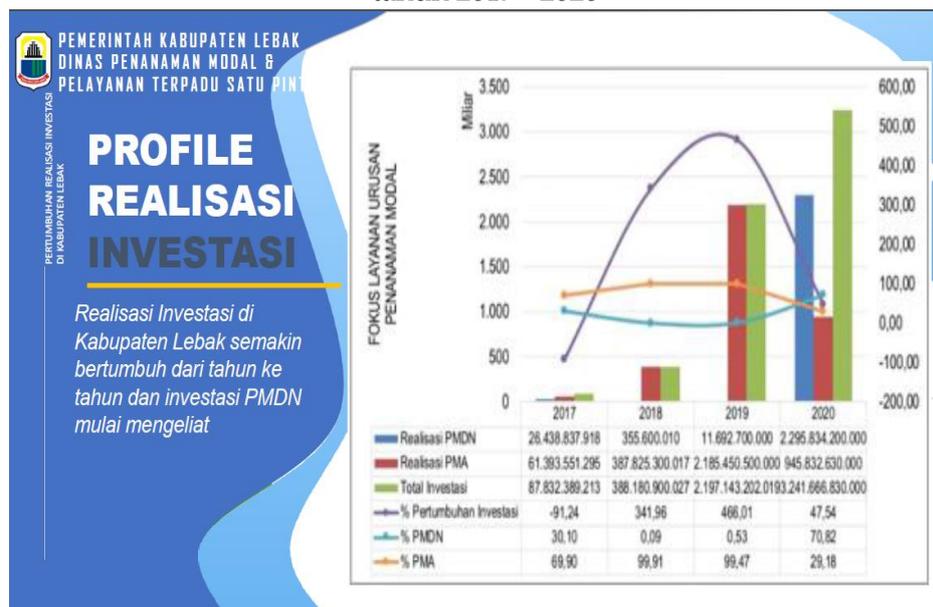
Sumber: Bappeda Lebak, 2023

Gambar 4.3 : Potongan Slide Peresntasi Lingkungan Bisnis Kondusif



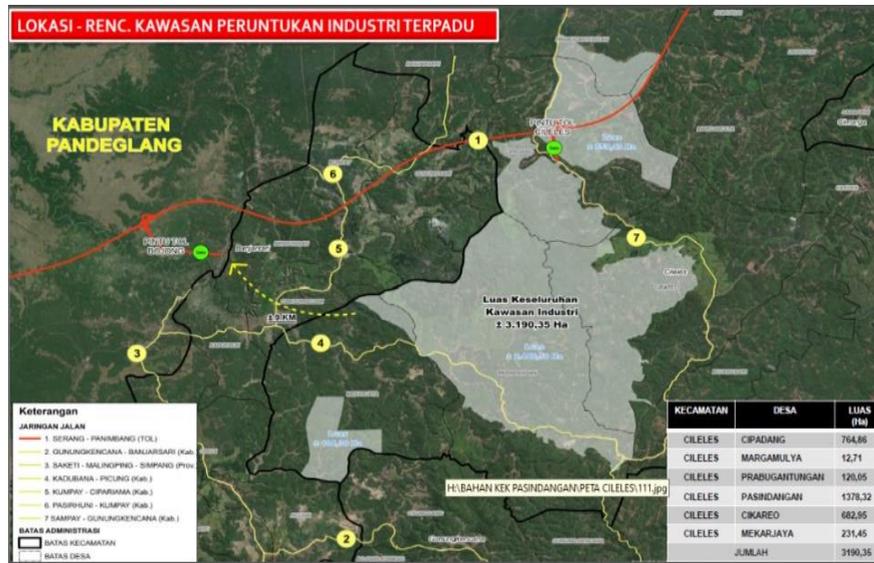
Sumber: Bappeda Lebak, 2023

Gambar 4.4 : Profile Realisasi Investasi Di Kabupaten Lebak, tahun 2017 - 2020



Sumber: DPMPTSP Lebak, 2023

Gambar 4.5 : Peta Rencana Kawasan Industri



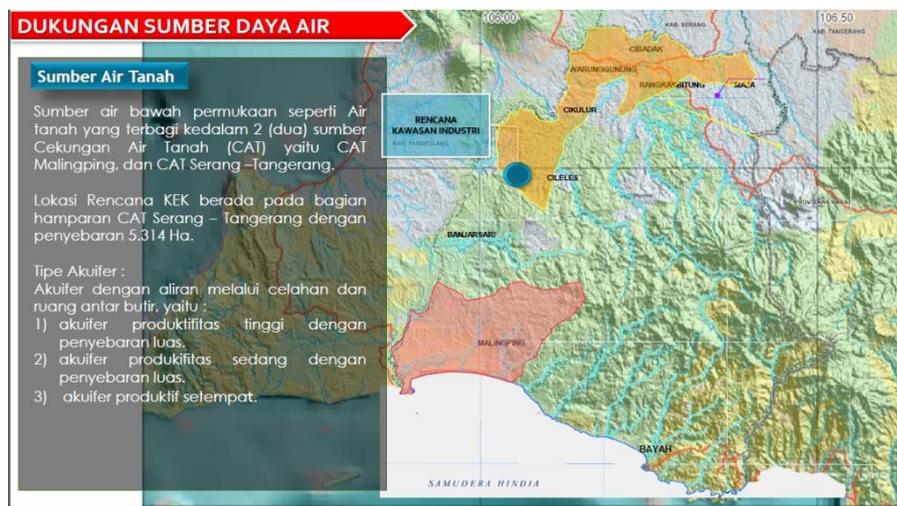
Sumber : Wawancara – PUPR, September 2023

Dapat disimpulkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan Cileles sebagai Daerah Kawasan Industri Baru di Kabupaten Lebak Tahun 2023 secara nyata telah melakukan studi kelayakan, dengan tetap memperhatikan semua resiko yang dihadapi baik dari hal teknis maupun non teknis. Keberhasilan meng-goalkan rencana ini, tentunya dapat diintegrasikan ke dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Kabupaten Lebak dan menjadikan kawasan industri baru ini sebagai salah satu penopang pendapatan asli daerah sehingga dengan berkembangnya kawasan ini, Kabupaten Lebak akan benar-benar terlepas kategori dari kabupaten miskin di Provinsi Banten. Hal ini tentu sesuai sebagaimana menurut Stufflebeam (1967) dalam teori nya Evaluasi Kebijakan CIPP (*Context, Input, Process, Product*) tentang *Context Evaluation* (Evaluasi Terhadap Masukan). Yaitu, menilai berbagai kebutuhan, masalah-masalah, kesempatan sebagai dasar untuk mendefinisikan tujuan dan prioritas dan menentukan hasil.

2. *Input Evaluation* (Evaluasi Terhadap Masukan)

Input Evaluation (Evaluasi Terhadap Masukan), adalah menilai pendekatan alternatif untuk menentukan alat yang diperlukan dalam perancangan program dan sumber daya yang dibutuhkan. Membahas apa saja Penetapan Kegiatan Petani mandiri dan bagaimana langkah-langkah struktural dan tindakan-tindakan non-struktural.

Gambar 4.6 : Peta Dukungan Sumber Daya air



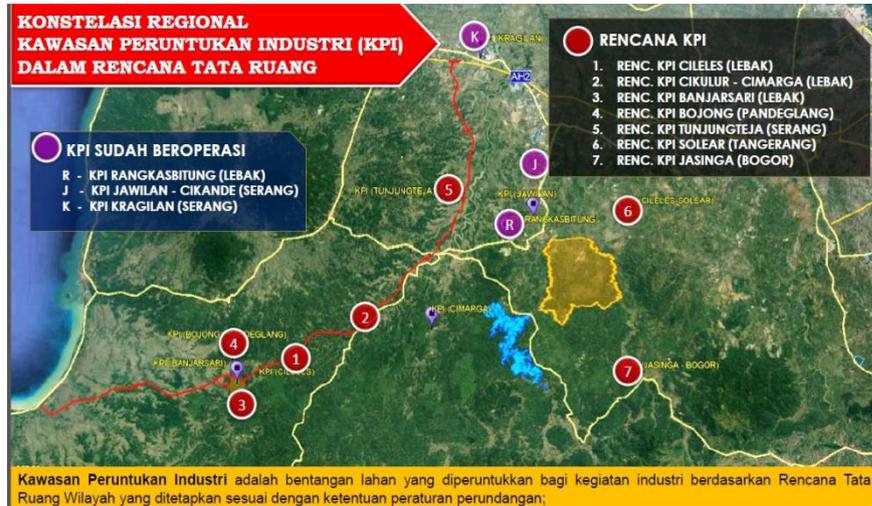
Sumber: Dinas PUPR, 2023

Berdasarkan kutipan wawancara dan telaah dokumen , penulis dapat menyimpulkan, bahwa kegiatan program Pembangunan Daerah Kawasan Industri Baru di Kabupaten Lebak Tahun 2023, seyogyanya perlu diapresiasi dan mendapat dukungan dari semua pihak, mengingat pembangunan kawasan ini akan berdampak pada pergerakan ekonomi regional kabupaten Lebak pada khususnya dan juga pada perekonomian di Provinsi Banten dan tak menutup kemungkinan pula secara Nasional. Program Pembangunan Daerah Kawasan Industri Baru di Kabupaten Lebak Tahun 2023 ini harus menjadi prioritas, baik oleh pihak Kabupaten Lebak, maupun pihak Provinsi Banten mengingat semua perizinan dari kementerian terkaitpun telah terpenuhi. Hal ini tentu sesuai sebagaimana menurut Stufflebeam (1967) dalam teori nya Evaluasi Kebijakan CIPP (*Context, Input, Process, Product*) tentang Input Evaluation (Evaluasi Terhadap Masukan). Yaitu, menilai pendekatan alternatif untuk menentukan alat yang diperlukan dalam perancangan program dan sumber daya yang dibutuhkan.

3. Process Evaluation (Evaluasi Terhadap Proses)

Process Evaluation (Evaluasi Terhadap Proses), adalah menilai implementasi dari program yang merupakan kerangka kerja dan kemudian membantu menjelaskan dampak dari program. Membahas bagaimana teknis Pembangunan Daerah Kawasan Industri Baru di Kabupaten Lebak Tahun 2023 ini.

Gambar 4.7 Konstelasi Regional Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dalam Rencana Tata Ruang



Sumber: Dinas PUPR, 2023

Berdasarkan kutipan wawancara dan telaah, penulis dapat menyimpulkan, bahwa partisipasi penuh semua dinas terkait, baik di lingkungan pemerintah kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat dalam kegiatan Pembangunan Kawasan Industri Baru Tahun 2023 di Kabupaten Lebak ini perlu diapresiasi oleh seluruh masyarakat. Sebagai masyarakat kita tentunya berkewajiban untuk ikut menjaga, memelihara dan mengawasi proyek pembangunan ini agar tujuan pembangunan ini dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat baik di wilayah Kabupaten Lebak maupun masyarakat di Provinsi Banten. Pembangunan kawasan industri baru ini memiliki konsep yang tetap memperhatikan lingkungan, dan didukung dengan pemetaan sumber air baku yang ada di wilayah Lebak. Sehingga kebutuhan air baku untuk masyarakat Lebak, bisa aman untuk jangka waktu beberapa puluh tahun ke depan. Hal ini tentu sesuai sebagaimana menurut Stufflebeam (1967) dalam teori nya Evaluasi Kebijakan CIPP (*Context, Input, Process, Product*) tentang Process Evaluation (Evaluasi Terhadap Proses). Yaitu, menilai implementasi dari program yang merupakan kerangka kerja dan kemudian membantu menjelaskan dampak dari program.

4. *Product Evaluation* (Evaluasi Terhadap Hasil)

Product Evaluation (Evaluasi Terhadap Hasil) bermaksud mengenai dan dampak yang tidak diharapkan keduanya membantu menjaga agar proses tidak keluar dari program yang telah ditetapkan dan menentukan keefektifan dari suatu program.

Berdasarkan kutipan wawancara dan telaah dokumen, penulis dapat menyimpulkan, bahwa rencana dari program Pembangunan Kawasan Industri Baru

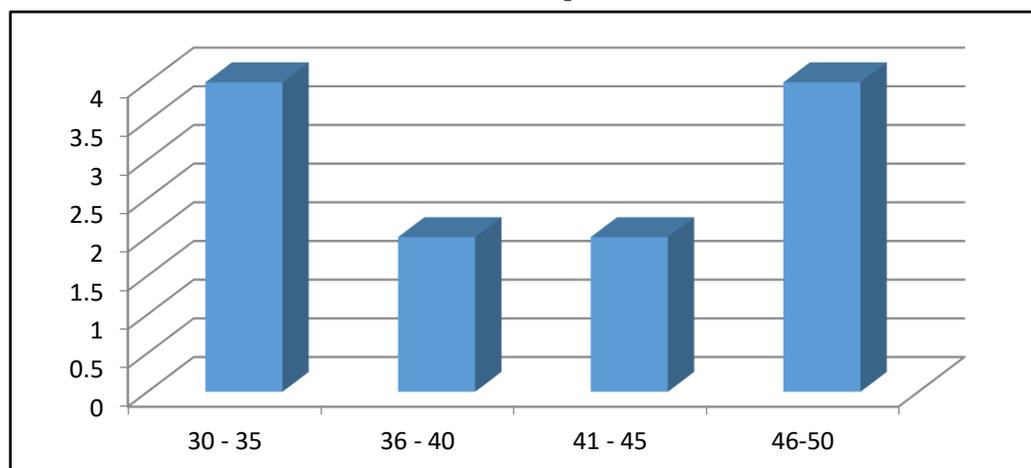
Di Kabupaten Lebak tahun 2023 ini mampu terealisasi mengingat rencana ini telah disusun dengan matang dan telah melalui beberapa tahap kajian. Dukungan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusatpun secara legitimasi telah didapat. Tentunya pengawasan yang melekat dari semua komponen masyarakat dapat diberikan agar proses pembangunan kawasan industri baru tersebut bisa berjalan sesuai rencana, dan tidak melenceng dari apa yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini tentu sesuai sebagaimana menurut Stufflebeam (1967) dalam teorinya Evaluasi Kebijakan CIPP (*Context, Input, Process, Product*) tentang *Product Evaluation* (Evaluasi Terhadap Produk). Yaitu, bermaksud mengenai dan dampak yang tidak diharapkan keduanya membantu menjaga agar proses tidak keluar dari program yang telah ditetapkan dan menentukan keefektifan dari suatu program.

b. Urgency, Seriousness, Growth (USG)

USG adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1-5. Isu yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode USG ini ke dalam 3 (tiga) bidang, yaitu: Bidang A: Keberlanjutan Lingkungan (*Environment Sustainability*); B: Pertumbuhan Ekonomi (*Economic Growth*) dan Keberlanjutan Sosial (*Social Sustainability*) sebagai bidang C.

Dari lembar Kuesioner yang dibagikan kepada para stakeholder, hanya terkumpul sebanyak 12 (dua belas) eksemplar. Sehingga dengan jumlah tersebut, peneliti tidak melakukan perhitungan Uji Validitas dan Uji Realibilitas, mengingat keterbatasan jumlah data yang masuk sampai batas akhir waktu yang telah ditentukan. Adapun ke- 12 responden yang mengisi kuesioner ini dapat di perlihatkan sebagai berikut:

Tabel 4.2 : Karakteristik Responden berdasarkan Usia



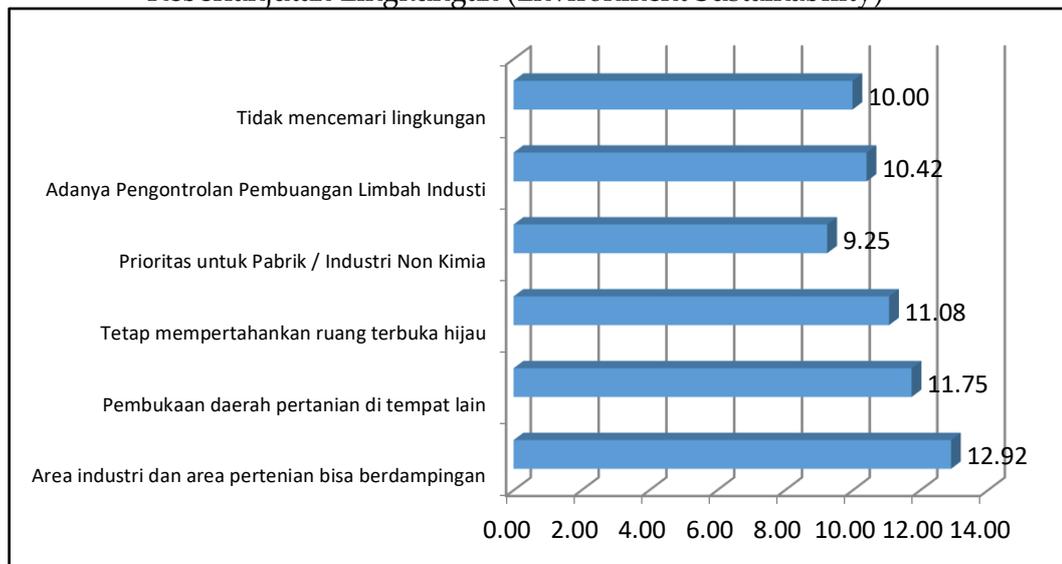
Sumber: Data Penelitian, 2023

Berdasarkan data dalam tabel 4.1 di atas, dapat dilihat bahwa usia responden cukup berimbang, antara usia 30 – 35 tahun dan 46 – 50 tahun dengan 7 orang, sementara yang berusia 36-40 dan 41-45 tahun juga berjumlah 2 orang. Dengan melihat usia responden, dengan rentang usia tersebut, maka dapat dikatakan responden dalam penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan.

1. Rekapitulasi Bidang A: Keberlanjutan Lingkungan (*Environment Sustainability*)

Hasil perhitungan jawaban responden untuk isian Bidang A, tersebut di sajikan dalam grafik, seperti pada gambar berikut:

Gambar 4.8 : Rekapitulasi Bidang A:
 Keberlanjutan Lingkungan (*Environment Sustainability*)



Sumber : Data Penelitian – Diolah, 2023

Berdasarkan Grafik 4.6 di atas, terlihat point yang paling besar bernilai 12.92 yang merupakan usulan prioritas pertama yaitu Area industri dan area pertanian bisa berdampingan, Sedangkan prioritas terakhir (ke-6) dengan total 9.25 dengan usulan Prioritas untuk Pabrik/Industri Non Kimia. Secara lengkap, hasil perhitungan responden untuk Bidang A, seperti terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.3: Rekapitulasi Isian Bidang A:
 Keberlanjutan Lingkungan (*Environment Sustainability*)**

NO.	URAIAN KEGIATAN	U	S	G	TOTAL	PRIORITAS
1	Area industri dan area pertanian bisa berdampingan	4.25	4.08	4.58	12.92	1

2	Pembukaan daerah pertanian di tempat lain	4.08	3.92	3.75	11.75	2
3	Tetap mempertahankan ruang terbuka hijau	3.92	3.42	3.75	11.08	3
4	Prioritas untuk Pabrik / Industri Non Kimia	3.08	3.17	3.00	9.25	6
5	Adanya Pengontrolan Pembuangan Limbah Industri	3.75	3.33	3.33	10.42	4
6	Tidak mencemari lingkungan	3.42	3.33	3.25	10.00	5

Sumber : Data Hasil Penelitian diolah, 2023

Dalam proses perencanaan Program Pembangunan Kawasan Industri Baru Di Kabupaten Lebak tahun 2023, tetaplah harus memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan (Environment Sustainability). Pada aspek ini, jawaban responden telah memberikan masukan pada pemerintah untuk memperhatikan lingkungan sekitar dari area proyek pembangunan tersebut. Dari enam uraian kegiatan yang diusulkan, berturut-turut merupakan prioritas yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah selaku pengembang wilayah tersebut, yaitu: sebagai prioritas ke-1, Area industri dan area pertanian bisa berdampingan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan pembangunan area industri agar tetap ramah lingkungan, sehingga pembukaan area industri tidak serta merta menghapus dan menghilangkan lahan pertanian. Survey di lapangan, usulan prioritas ini menempati urutan pertama dengan nilai 12.92.

Selanjutnya usulan prioritas ke-2 adalah Pembukaan daerah pertanian di tempat lain dengan nilai 11.75. Prioritas ini sangatlah masuk akal, mengingat pembangunan daerah industri baru ini sebagian akan mengalih fungsikan lahan pertanian yang ada menjadi daerah industri. Oleh sebab itu, untuk mencukupi kebutuhan pangan daerah, maka pemerintah kabupaten harus memperhatikan area pertanian di daerah lain sebagai pengganti wilayah yang kena proyek. Di usulan prioritas ke-3 dengan nilai 11.08 dengan usulan tetap mempertahankan ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau dengan tanaman keras sebagai peneduh harus ada dan dipertahankan, bukan saja sebagai peneduh namun penting juga sebagai penangkap oksigen dan menjadikan wilayah yang tidak terlalu panas.

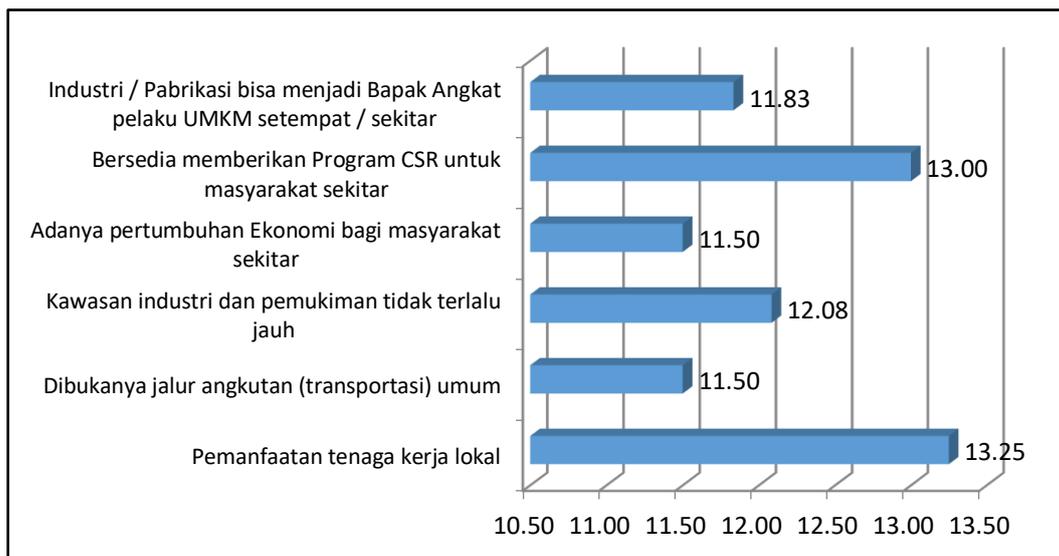
Selanjutnya usulan adanya pengontrolan pembuangan limbah industri menempati peringkat ke-4 dari prioritas yang diusulkan dengan nilai 10.42. Pengontrolan pembuangan industri sangatlah penting. Mengingat limbah industri jika tidak dikontrol

bisa mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kesehatan masyarakat. Selanjutnya di tempat ke-5, tidak mencemari lingkungan dengan nilai 10.00. mengamankan proyek pembangunan haruslah bersih dan tidak mencemari lingkungan. Karena jika lingkungan sekitar sudah tercemar limbah dan kotoran industri, untuk memulihkannya susah dan memerlukan beberapa tahun untuk bisa normal kembali. Terakhir untuk prioritas 6, dengan nilai 9.25 yang merupakan usulan Prioritas untuk Pabrik / Industri Non Kimia.

2. Rekapitulasi Bidang B: Pertumbuhan Ekonomi (*Economic Growth*)

Hasil perhitungan jawaban responden untuk isian Bidang A, tersebut di sajikan dalam grafik, seperti pada gambar berikut:

Gambar 4.9 : Bidang B: Pertumbuhan Ekonomi (*Economic Growth*)



Sumber : Data Hasil Penelitian – Diolah, 2023

Berdasarkan grafik di atas, terlihat nilai yang paling tinggi adalah 13.25 dengan prioritas usulan Pemanfaatan tenaga kerja lokal. Usulan ini sangatlah rasional, bahwa dengan adanya pembangunan di sebuah wilayah, maka penduduk sekitar yang terkena dampak maka sudah selayaknya mereka juga ikut dapat bekerja di daerahnya sendiri. Hasil penilaian responden, secara lengkap dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4 : Rekapitulasi Bidang B: Pertumbuhan Ekonomi (*Economic Growth*)

NO.	URAIAN KEGIATAN	U	S	G	TOTAL	PRIORITAS
1	Pemanfaatan tenaga	4.67	4.75	3.83	13.25	1

kerja lokal						
2	Dibukanya jalur angkutan (transportasi) umum	4.08	4.08	3.33	11.50	5
3	Kawasan industri dan pemukiman tidak terlalu jauh	4.42	4.33	3.33	12.08	3
4	Adanya pertumbuhan Ekonomi bagi masyarakat sekitar	4.50	3.67	3.33	11.50	5
5	Bersedia memberikan Program CSR untuk masyarakat sekitar	5.00	4.75	3.25	13.00	2
6	Industri / Pabrikasi bisa menjadi Bapak Angkat pelaku UMKM setempat / sekitar	4.75	4.00	3.08	11.83	4

Sumber : Data Hasil Penelitian – diolah, 2023

Berdasarkan jawaban responden terhadap pernyataan isia Bidang B: Pertumbuhan Ekonomi, sangatlah masuk akal bahwa usulan prioritas pertama adalah Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal, menempati urutan pertama dengan total nilai 13.25. Banyak industri diberbagai daerah, ketika sudah beroperasi ternyata yang kerja di perusahaan itu merupakan penduduk pendatang, bukan penduduk lokal dimana pabrik itu berdiri dan beroperasi, sehingga penduduk setempat hanyalah sebaga penontol di kampungnya sendiri, karena penduduk lokal tidak siap berkopetensi dengan tenaga kerja pendatang.

Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi penduduk dan masyarakat Kecamatan Cileles untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin, agar hal ini tidak sampai menimpa mereka. Selanjutnya di prioritas 2, dengan nilai 13.00 Bersedia memberikan Program CSR untuk masyarakat sekitar, dan usulan prioritas ke-3 dengan nilai 12.08 terkait kawasan industri dan pemukiman tidak terlalu jauh. Pada usulan ini, masyarakat responden menginginkan jika kawasan industri dan pemukiman penduduk tidak terlalu jauh, diharapkan penduduk sekitar bisa membuka usaha yang diharapkan dapat membantu kebutuhan para pekerja di industri tersebut.

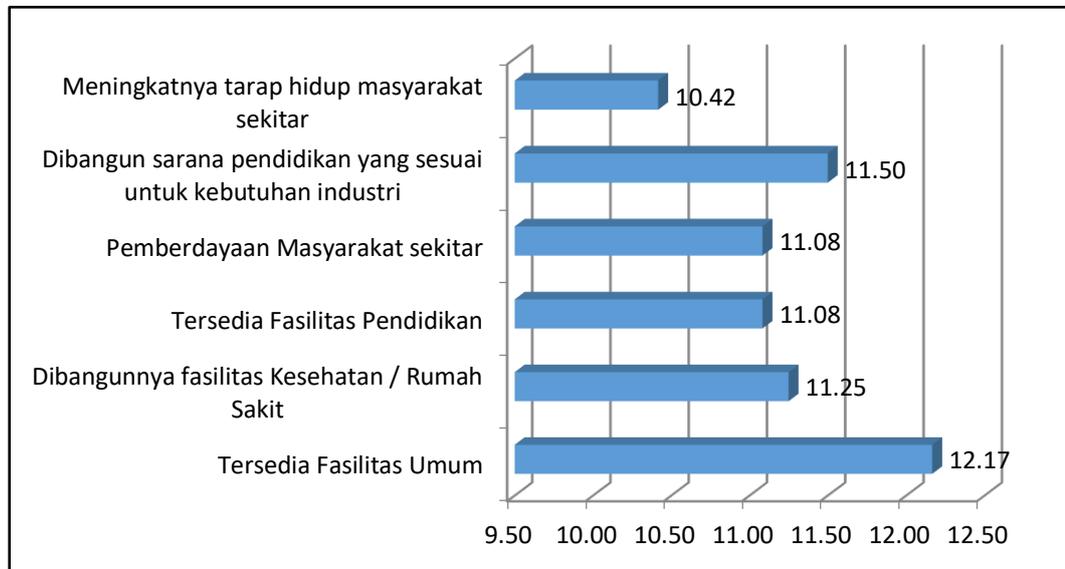
Prioritas ke-4 dari bidang b ini adalah yaitu usulan Industri / Pabrikasi bisa menjadi Bapak Angkat pelaku UMKM setempat / sekitar, dengan total 11.83. sedangkan urutan

ke-5 ada 2 usulan dengan memperoleh nilai yang sama sebesar 11.50, yaitu usulan Dibukanya jalur angkutan (transportasi) umum dan adanya pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat sekitar.

3. Rekapitulasi Bidang C: Keberlanjutan Sosial (*Social Sustainability*)

Berikut ini merupakan gambar grafik dari jawaban responden terkait pernyataan bidang c, keberlanjutan sosial, seperti terlihat di halaman berikut:

Gambar 4.10 : Bidang C Keberlanjutan Sosial (*Social Sustainability*)



Sumber : Data Hasil Penelitian – diolah, 2023

Selanjutnya dari hasil perhitungan isian kuesioner para responden dengan menggunakan metode USG, untuk isian Bidang C, dapat di laporkan rekapitulasi perhitungan sebagai berikut:

Tabel 4.5 : Rekapitulasi Bidang C: Keberlanjutan Sosial (*Social Sustainability*)

NO.	URAIAN KEGIATAN	U	S	G	TOTAL	PRIORITAS
1	Tersedia Fasilitas Umum	4.08	3.25	4.83	12.17	1
2	Dibangunnya fasilitas Kesehatan / Rumah Sakit	3.58	3.58	4.08	11.25	3
3	Tersedia Fasilitas Pendidikan	3.67	3.25	4.17	11.08	4
	Pemberdayaan	3.92	3.50	3.67	11.08	4

	Masyarakat sekitar					
5	Dibangun sarana pendidikan yang sesuai untuk kebutuhan industri	3.08	3.92	4.50	11.50	2
6	Meningkatnya taraf hidup masyarakat sekitar	3.08	3.42	3.92	10.42	5

Sumber : Data Hasil Penelitian – diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas, usulan Bidang C: Keberlanjutan Sosial (*Social Sustainability*) untuk prioritas pertama adalah Tersedianya Fasilitas Umum, dengan total 12.17. Fasilitas umum ini penting dan banyak ragamnya. Sehingga usulan ini menjadi prioritas yang harus diperhatikan. Sementara prioritas diurutkan ke-2, dengan nilai 11.50, terkait usulan Dibangun sarana pendidikan yang sesuai untuk kebutuhan industri. Sarana pendidikan peting, baik untuk masyarakat sekitar maupun untuk keluarga yang bekerja di kawasan tersebut. Di urutan prioritas ke-3, dengan nilai 11.25, tentang Dibangunnya fasilitas Kesehatan / Rumah Sakit. Sementara prioritas diurutkan ke-4 ada dua usulan prioritas dengan nilai perolehan yang sama sebesar 11.08, yaitu usulan Tersedia Fasilitas Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat. sedangkan prioritas terakhir (ke-5) yaitu Meningkatkan taraf hidup sekitar, dengan total 10.42.

Usulan terkait keberlanjutan sosial, ini merupakan harapan dari para responden bahwa ketika kawasan industri sudah di bangun dan beroperasi, maka keberlanjutan sosial masih bisa berjalan. Jangan sampai terbangunnya kawasan industri justru akan membuat jurang pemisah antara masyarakat sekitar industri dengan masyarakat yang bekerja dikawasan industri tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan Cileles sebagai Daerah Kawasan Industri Baru di Kabupaten Lebak sebagai berikut:

- a. **Context Evaluation** : Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan Cileles sebagai Daerah Kawasan Industri Baru di Kabupaten Lebak Tahun 2023 secara nyata telah melakukan studi kelayakan, dengan tetap memperhatikan semua resiko yang dihadapi baik dari hal teknis maupun non teknis. Keberhasilan meng-goalkan rencana ini, tentunya dapat di diintegrasikan ke dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Kabupaten Lebak dan menjadikan kawasan industri

baru ini sebagai salah satu penopang pendapatan asli daerah sehingga dengan berkembangnya kawasan ini, Kabupaten Lebak akan benar-benar terlepas kategori dari kabupaten miskin di Provinsi Banten.

- b. Input Evaluation** : bahwa kegiatan program Pembangunan Daerah Kawasan Industri Baru di Kabupaten Lebak, seyogyanya perlu diapresiasi dan mendapat dukungan dari semua pihak, mengingat pembangunan kawasan ini akan berdampak pada pergerakan ekonomi regional kabupaten Lebak pada khususnya dan juga pada perekonomian di Provinsi Banten dan tak menutup kemungkinan pula secara Nasional.
- c. Process Evaluation** : bahwa partisipasi penuh semua dinas terkait, baik di lingkungan pemerintah kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat dalam kegiatan Pembangunan Kawasan Industri Baru di Kabupaten Lebak ini perlu diapresiasi oleh seluruh masyarakat. Sebagai masyarakat kita tentunya berkewajiban untuk ikut menjaga, memelihara dan mengawasi proyek pembangunan ini agar tujuan pembangunan ini dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat baik di wilayah Kabupaten Lebak maupun masyarakat di Provinsi Banten. Pembangunan kawasan industri baru ini memiliki konsep yang tetap memperhatikan lingkungan, dan didukung dengan pemetaan sumber air baku yang ada di wilayah Lebak. Sehingga kebutuhan air baku untuk masyarakat Lebak, bisa aman untuk jangka waktu beberapa puluh tahun ke depan.
- d. Product Evaluation** : bahwa rencana dari program Pembangunan Kawasan Industri Baru Di Kabupaten Lebak ini mampu terealisasi mengingat rencana ini telah disusun dengan matang dan telah melalui beberapa tahap kajian. Dukungan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusatpun secara legitimasi telah didapat. Tentunya pengawasan yang melekat dari semua komponen masyarakat dapat diberikan agar proses pembangunan kawasan industri baru tersebut bisa berjalan sesuai rencana, dan tidak melenceng dari apa yang telah direncanakan sebelumnya.

REFERENSI

- Abdul Wahab, Solichin, 2012, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara
- AG. Subarsono, 2005, Analisis kebijakan publik : konsep, teori dan aplikasi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Anas Sudjiono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)
- Anderson, James A. (1975). *Public Policy Making: Basic Concept in Political Sciences*. New York: Praeger University Series.

- Brysson, J. M. (2004). What Do When Stakeholders Matter : *Stakeholder Identification and Analysis Technique*. Meneapolis: Humbert H. Humphrey Institute of Public Affairs.
- Creswell, J. W. 2014. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Daniel L. Stufflebeam dan Chris L. sS. Coryn, *Evaluation Theory Models And Applications* (SanFransisco: Jossey Bas, 2014), 35.
- Daniel L. Stufflebeam dan Guili Zhang, *The CIPP Evaluation Model* (New York: The Guilford Press, 2017),
- Daryanto, 2010, *Evaluasi Pendidikan Komponen MKDK*, Jakarta: Rineka Cipta
- Dharmawan, Awan Setia, and Andy Agung Sasmita. 2023. "Pembangunan Berkelanjutan Dalam Menghadapi Krisis Lingkungan." *Seminar Nasional Sosiologi* 4:20–35.
- Haliah, Haliah, and Nirwana Nirwana. 2019. "The Development of Good Governance Model for Performance Improvement." *International Journal of Excellence in Government* 1(1):21–36. doi: 10.1108/ijeg-09-2018-0004.
- Howlett, M., & Ramesh, M. (1995). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems* (p. 163). Oxford: Oxford University Press
- Keller, Gwendolen J., Robert A. Slesak, Dustin Bronson, Marcella A. Windmuller-Campione, and Amanda McGraw. 2023. "Effects of Flood Duration on Seedling Survival and Growth of Potential Replacement Species in Black Ash (*Fraxinus Nigra* Marshall) Forests Threatened by Emerald Ash Borer." *Trees, Forests and People* 11(December 2022):100367. doi: 10.1016/j.tfp.2022.100367.
- Kusen, Kusen, Ahmad Sihabudin, and Juliannes Cadith. 2023. "Kolaborasi Pengembangan Pariwisata Desa Sawarna." *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik* 4(2):26–33. doi: 10.30656/jdkp.v4i2.6569.
- Matthew B Miles, Michael Huberman, Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis*. Beverly Hill, CA: Sage Publications.
- Muhlis, Taufik, Ernani Rustiadi, and Khursatul Munibah. 2023. "Machine Translated by Google Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Pandeglang Banten." *Astonjadro* 12(September 2021):495–506.
- Pandjaitan, Rosmawaty Hilderiah. 2020. "Masalah Komunikasi Pariwisata Desa Dalam Perspektif Masyarakat Desa Sawarna Lebak Banten." *Mediakom : Jurnal Ilmu Komunikasi* 4(1):62–74. doi: 10.35760/mkm.2020.v4i1.2496.

-
- Slamy, Irfan M. 2003. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Jakarta: Bumi Aksara.
- Solihind Abdul Wahab, 2014, Analisis Kebijakan, Jakarta: Bumi aksara, 15
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto, Cepi Safruddin, dan Abdul Jabar, Evaluasi Program Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2011)
- Sukardi, 2014, Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan, Jakarta: Bumi Aksara
- Stufflebeam, D.L. (1971). Evaluation as enlightenment for decision making. Columbus, Ohio: Ohio State University.
- Trommel, Willem. 2020. "Good Governance as Reflexive Governance: In Praise of Good Colleagueship." *Public Integrity* 22(3):227–35. doi: 10.1080/10999922.2020.1723356.
- Wirawan, Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi, Contoh Aplikasi Evaluasi Program: Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, Kurikulum, Perpustakaan, dan Buku Teks, (Jakarta: Rajawali Press, 2011),
- Yin, R. .. 2003. "Case Study Research Design and Methods, Third Edition, Applied Social Research Methods Series." 5:1–181.
- Young, Jesse D., Alan A. Ager, and Andrea E. Thode. 2022. "Using Wildfire as a Management Strategy to Restore Resiliency to Ponderosa Pine Forests in the Southwestern United States." *Ecosphere* 13(5):1–20. doi: 10.1002/ecs2.4040.
- Yunus Wahid, 2016, Pengantar Hukum Tata Ruang, Jakarta: Prenada Media
Zainal Arifin, 2010, "Model-Model Evaluasi Program," Bandung : UPI, 2010